

Judul : Sistem Paylater dikeluhkan, Senayan minta OJK lakukan pendalaman
Tanggal : Senin, 29 April 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Sistem Paylater Dikeluhkan Senayan Minta OJK Lakukan Pendalaman

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) ikut menyoroti banyaknya aduan terhadap PT Commerce Finance atau Shopee Paylater (Spaylater). Aduan ini merupakan keluhan dari masyarakat yang jika dibiarkan akan banyak yang menjadi korban.

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa segera menindaklanjuti aduan masyarakat ini. "Kami harap OJK bisa segera menindaklanjuti dan mendalami persoalan tersebut bersama korban dan perusahaan terkait," dalam keterangannya, kemarin.

Puteri menyebutkan penyelenggara pendanaan daring perlu memperkuat penilaian kelayakan pendanaan dan menjamin perlindungan data pribadi konsumen. Hal tersebut sesuai Pasal 47 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi. Beleid ini mengatur agar penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi tersebut.

Ia pun berharap OJK bisa lebih proaktif dalam menghadapi persoalan seperti ini. Salah satunya melalui dengan penerapan sanksi. Sehingga,



Puteri Anetta Komarudin

apabila terjadi pelanggaran, maka penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan aktivitas usaha, hingga pencabutan izin bisa diterapkan. "Tapi tentunya setiap aduan masyarakat perlu didalami terlebih dahulu," ujar politisi Partai Golkar ini.

Puteri juga berharap OJK dapat mengevaluasi sistem mitigasi risiko dan keamanan dari setiap penyelenggara pendanaan daring. Sehingga nantinya diketahui entitas mana saja yang tingkat keamanannya lemah dan perlu segera ditingkatkan. "Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari," tandasnya. ■ KAL